**DANA DESA ACEH BESAR CAPAI RP 3 TRILIUN**

*[](https://cdn-2.tstatic.net/aceh/foto/bank/images/kadis-pmg-aceh-besar-carbaini-sag.jpg)*

*For Serambinews.com*

*Kadis PMG Aceh Besar, Carbaini SAg.*

JANTHO - Pj Bupati [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar) Muhammad Iswanto diwakili Sekda kabupaten [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar) Drs Sulaimi MSi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ( [DPMG](https://aceh.tribunnews.com/tag/dpmg)) terkait evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan percepatan penyusunan perencanaan anggaran tahun 2023 itu berlangsung di Aula [DPMG](https://aceh.tribunnews.com/tag/dpmg) [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar). Turut hadir dalam kesempatan itu, Asisten I Setdakab [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar) Farhan AP, jajaran [DPMG](https://aceh.tribunnews.com/tag/dpmg) [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar), para camat [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar" \o "Aceh Besar), dan unsur terkait lainnya Sulaimi mengatakan, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, saat ini gampong tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tapi juga sebagai perancang dan pelaksana pembangunan, dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga gampong bukan hanya sebagai objek pembangunan, tapi juga menjadi subyek dan motor penggerak pembangunan yang partisipatif.

Ditambahkan, sudah 8 tahun pemerintah pusat menganggarkan [dana desa](https://aceh.tribunnews.com/tag/dana-desa) untuk diberikan kepada 604 gampong di [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar). Jika ditotalkan sejak tahun 2015 hingga 2022, maka sudah sebanyak Rp 3 triliun anggaran [dana desa](https://aceh.tribunnews.com/tag/dana-desa) yang diterima [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar). “Jika dibagi 604 gampong, maka rata-rata setiap gampong telah menerima Rp 4,9 M. Selain itu, di gampong bukan hanya [dana desa](https://aceh.tribunnews.com/tag/dana-desa) yang menjadi sumber pendapatannya, tapi juga ada alokasi dana gampong (ADG), pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi, serta Pendapatan Asli Gampong,” kata Sulaimi, Sabtu (3/12/2022).

Dengan meningkatkannya jumlah anggaran yang dikelola oleh setiap gampong, tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, sehingga tata kelola pemerintahan gampong akan terus ditingkatkan agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara baik, efektif, serta efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Sekda menambahkan, sangat dibutuhkan perhatian dari semua pihak agar penyaluran dan pengelolaan keuangan gampong dapat berlangsung baik.

Ke depan, Pemkab [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar) berharap agar setiap gampong sudah harus mandiri serta memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di gampong Dalam rangka evaluasi anggaran pendapatan dan belanja gampong, para camat juga sangat berperan untuk menghasilkan dokumen APBG yang berkualitas, sehingga berdampak baik terhadap perkembangan dan kemajuan di setiap gampong di [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar). Sementara itu, Kepala [DPMG](https://aceh.tribunnews.com/tag/dpmg) [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar), Carbaini SAg menjelaskan, Rapat Koordinasi tersebut dihadiri 60 peserta, yang terdiri dari Kepala OPD terkait, para camat, Kasi PMG, Koordinator TAPM [Aceh Besar](https://aceh.tribunnews.com/tag/aceh-besar), unsur tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya.

"Yang dibahas dalam rakor kemarin terkait proses [dana desa](https://aceh.tribunnews.com/tag/dana-desa), proses program/kegiatan masing-masing bidang yang harus dikoordinasikan dengan camat untuk adanya peningkatan pengambilan strategis tahun 2023, pembahasan Rancangan Perbup Pedoman Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2023. Selain itu, juga penyerahan dan penjelasan teknis SML Siskeudes Tahun Anggaran 2023," pungkasnya.

**Sumber berita:**

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Dana Desa Aceh Besar Capai Rp 3 Triliun, <https://aceh.tribunnews.com/2022/12/04/dana-desa-aceh-besar-capai-rp-3-triliun>, Minggu, 4 Desember 2022.

**Catatan:**

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Pasal 71
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dak kewajiban Desa.
4. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pasal 72
6. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
7. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
8. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
10. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
11. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
12. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
13. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
17. Pasal 1
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Pasal 16
20. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
21. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
22. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi urn um dan/ atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
23. Pasal 24
24. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
25. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negen, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
26. Pasal 26
27. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
28. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
29. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
30. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
31. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
32. Sisa Dana Desa.